

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Globalisasi sebagai sebuah era yang memfasilitasi transparansi informasi menuntut pemerintah untuk bisa berinovasi dalam menjalankan praktik pemerintahan. Praktik E-Government di dunia ini menjadi sebuah inovasi besar bagi seluruh jajaran birokrasi untuk menunjang pelayanan publik. UU No 25 Tahun 2009 Mengenai *Public Service* di dalam Pasal 15 bahwa pelaksana *Public Service* mempunyai suatu kewajiban untuk memenuhi standar pelayanan yang telah disusun baik dari segi kualitas dan secara prosedurnya.

Kinerja pelayanan yang mendapat *image* lambat dan birokrasi yang berbeli-belit menjadi satu perhatian khusus untuk mendukung program percepatan reformasi birokrasi karena hal tersebut seringkali menjadi penyebab masyarakat menjadi semakin apatis dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga tuntutan inovasi pelayanan publik terus diupayakan untuk menyukseskan 9 program percepatan reformasi birokrasi seperti yang dipaparkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (<http://www.menpan.go.id/>) yaitu penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS kemudian pengembangan sistem elektronik pemerintah (*e-government*) peningkatan pelayanan

publik serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi aparatur negara, lalu peningkatan kesejahteraan pegawai negeri , efisiensi penggunaan fasilitas serta peningkatan sarana dan prasarana kerja PNS.

Penggunaan seluruh fasilitas negara tersebut tentunya diperuntukkan untuk dapat lebih memaksimalkan kinerja para aparatur negara, tetapi dalam melaksanakan kinerjanya maka perlu diadakannya penilaian kinerja. Untuk mendapatkan penilaian kinerja yang lebih objektif dan sesuai dengan aspirasi masyarakat , maka dibutuhkan suatu program yang dapat memberikan fasilitas untuk masyarakat ataupun para staff kasi kewilayahan yang berperan sebagai aktor penilai kinerja layanan tersebut. Maka digulirkanlah Peraturan Walikota No. 1354 Tahun 2014 yang telah diperbaharui pada tahun 2019 Tentang Evaluasi Kinerja, pemerintah sadar bahwa kinerja pemimpin pada suatu wilayah harus dievaluasi dengan cara yang unik, yang menantang dan memotivasi, maka dari itu digulirkanlah program aplikasi sistem penilaian kinerja camat dan lurah kota Bandung yang kemudian disebut dengan aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara. Aplikasi ini merupakan sebuah *platform* untuk melaporkan setiap program yang dijalankan oleh pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan.

Aplikasi ini diluncurkan oleh Walikota Bandung di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil dan diakses melalui website <http://sip.bandung.go.id/> yang dengan adanya aplikasi ini dapat menjadi wadah atau fasilitas untuk masyarakat yang ingin

berpartisipasi secara demokratis dengan memberikan penilaian kinerja pelayanan untuk tingkat kecamatan ataupun kelurahan di Kota Bandung.

Aplikasi SIP ini bisa dijadikan sebagai raport pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan dalam mempertanggungjawabkan tugas fungsi dan peran, perjanjian dan ketaatan pada peraturan yang sudah disepakati bersama oleh para pejabat publik. Aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) ini diluncurkan Ridwan Kamil pada tanggal 26 Juni 2014. Meskipun pada awalnya tidak diluncurkan melalui sebuah aplikasi melainkan dijalankan secara manual, namun sistem ini sempat tidak berjalan secara produktif sehingga Ridwan Kamil memutuskan untuk membuat aplikasi resminya.

Namun berdasarkan observasi awal, peneliti melihat beberapa fenomena positif dan fenomena negatif berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan SIP Bandung Juara. Di lingkungan Kecamatan Mandalajati. Peneliti melihat bahwa Kecamatan Mandalajati selama dua tahun berturut-turut mendapatkan prestasi yang membanggakan bahkan terjadi kenaikan peringkat pada tahun 2019 pada lomba pengisian Sistem Informasi Penilaian Pemerintah Perangkat Daerah dan Kewilayahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Pada lomba tersebut Kecamatan Mandalajati berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 800/Kep.1568-Pem. Tanggal 26 Desember 2018. Kecamatan Mandalajati mendapatkan posisi peringkat ke III dengan perolehan nilai sebesar 94,91 dengan keterangan berkinerja baik dan mendapatkan peringkat ke II pada tahun 2019. Serta *reward* dari lomba tersebut yang diberikan oleh pihak Wali

Kota sangat menggiurkan yaitu berupa tiket liburan ke negara korea bagi juara I dan ke Bali bagi yang mendapat peringkat II dan III. Disertai mendapatkan piagam penghargaan. Selain itu, program-program yang diminta oleh SIP Bandung Juara khususnya yang dilaksanakan di Kecamatan Mandalajati seperti yang dilaksanakan di kasi ekbang melalui program lomba *eco office* mendapatkan peringkat I pada tahun 2019, lalu Juara I lomba Kang Pisman Awards pada tahun 2019. Lalu mendapatkan banyak prestasi pada kasi pemerintahan seperti juara II Lomba tertib arsip Tingkat Perangkat Daerah dan Kewilayahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2018, Tertib Administrasi Kelurahan Sindangjaya pada tahun 2019 dan banyak lagi prestasi yang lainnya yang memang menjadi indikator penilaian aktivitas yang diminta oleh SIP Bandung Juara.

Fenomena yang mengarah kepada hal negatifnya yang penulis lihat di lingkungan kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam hal pengimplementasian aplikasi SIP Bandung Juara ini yaitu sering terjadinya kesalahan dari pihak kelurahan dalam mengisi dan menginput data melalui aplikasi SIP Bandung juara, sehingga menyebabkan prestasi lomba SIP Kecamatan Mandalajati sempat terancam turun pada tahun 2019 dan Camat mandalajati mengadakan suatu rapat yang sangat menegaskan kepada para staff kasi untuk lebih handal dan disiplin dalam menginput data di aplikasi SIP Bandung Juara, jangan sampai data yang diupload tidak sesuai dengan waktu pengiriman dan foto yang di *upload* ke dalam aplikasi tersebut tidak sesuai dengan program yang diminta, juga kelalaian dalam disiplin target pelaksanaan

program, sehingga mengalami keterlambatan dalam mengirim laporan kepada pihak Walikota Bandung melalui aplikasi SIP Bandung Juara tersebut. Kemudian fenomena berikutnya adalah peneliti melihat di kantor kecamatan Mandalajati terdapat kotak saran dan kritik yang umumnya tidak pernah dibuka. Bahkan pihak masyarakat pun jarang menggunakan fasilitas tersebut untuk menaylurkan aspirasinya kepada pihak Kecamatan Mandalajati. Sehingga laporan dari masyarakat dan keluhan-keluhut tersebut masih mendapatkan kesulitan untuk menindaklanjutinya dan pihak Kecamatan sendiri sepertinya tidak mau untuk memusingkan diri dengan menerima penilaian dari masyarakat dan beranggapan bahwa masyarakat hanyalah sebagai pendukung semata bukan sebagai evaluator kinerja camat.

Program SIP Bandung Juara ini berhubungan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi juga SDM dituntut untuk bisa melek internet maka aplikasi SIP Bandung Juara ini diperlukan SDM yang mumpuni dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Sehingga dari beberapa fenomena yang telah dilihat oleh peneliti melalui observasi partisipatif di lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung baik itu yang sifatnya ke arah positif maupun beberapa ke arah negatif terkait pengimplementasian aplikasi SIP Bandung Juara di lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung pada Tahun 2019.

Banyak hal yang ingin penulis ketahui mengenai usaha dibalik tercapainya prestasi yang diraih oleh kecamatan mandalajati dan juga tentang bagaimana usaha Kecamatan Mandalajati dalam memperbaiki kekurangan dari pelaksanaan aplikasi

SIP Bandung Juara ini . Bertolak dari hal tersebut, peneliti tertarik mengambil judul penelitian **Implementasi Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara Di Lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di kemukakan di atas, penulis memfokuskan beberapa permasalahan :

1. Pada tahun 2018-2019 Kecamatan Mandalajati tidak meraih juara untuk Sistem Informasi Penilaian dilengkapi dengan banyaknya prestasi lain pada kasi ekbang dan kasi pemerintahan
2. Pelaksanaan implementasi kebijakan program aplikasi SIP Bandung Juara di lingkungan Kecamatan Mandalajati mendapatkan perolehan Juara III pada tahun 2018 dan naik satu peringkat menjadi juara III pada tahun 2019.
3. Masih terdapat beberapa kendala ketika memberikan pelayanan publik khususnya dari bidang sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi SIP Bandung Juara dan juga penggunaan fasilitas kotak saran yang masih belum optimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Bagaimana Implementasi Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara Di Lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung”.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

a) Secara Teoritis

Bagi penulis , dasarnya adalah untuk mengembangkan teori-teori akademis dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dari keilmuan dan secara akademis dalam pengembangan konsep-konsep serta teori-teori sistem evaluasi.

b) Secara Praktis

Karya kecil dari penelitian ini berharap turut serta memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan untuk meninjau kembali permasalahan yang ada di dalam lingkup ruang kerja birokrasi di lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam pengimplementasian kebijakan Program Penyelenggaraan Aplikasi evaluasi kinerja Sistem Informasi Penilaian sesuai dengan Perwal No. 1354 Tahun 2014 Tentang Evaluasi Kinerja.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penulis akan membahas mengenai Evaluasi Program Penerapan Aplikasi SIP Bandung Juara Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2018. Berkaitan dengan kebijakan program tersebut maka peneliti mengambil ruang lingkup pembahasan teori diantaranya teori Administrasi Publik, Kebijakan Publik dan Evaluasi Kebijakan.

Siagian dalam Akadun (2009) menjelaskan Administrasi sebagai suatu proses pelaksanaan keputusan hasil musyawarah dan pelaksanaannya dilakukan oleh banyak orang agar tercapai tujuan dan cita-cita bersama.

Hidayat (2012:21) dalam bukunya mengutip pendapat ilmiah dari Dwight Waldo mengenai Administrasi Publik bahwa ia mendefinisikan administrasi publik sebagai management dan organisasi, peralatan manusia untuk mencapai tujuan komunal.

Dye yang dikutip dari Young dan Quinn (2002:5) memberi definisi Kebijakan Publik secara luas yaitu “*Whatever government choose to do or not to do*”. Secara lebih spesifik pengertian dari Anderson oleh Young dan Quinn yakni bahwa kebijakan public adalah “*a purposive course of action followed by an actor or a set of.*”

Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dan keputusan berbentuk perintah-perintah yang terhimpun dalam Undang-Undang dan aktor yang melaksanakannya adalah dari badan eksekutif penting maupun dari badan peradilan. Keputusan-keputusan tersebut berupa proses identifikasi masalah yang harus diatasi

dengan menjabarkan berbagai alternative agar terciptanya proses implementasi kebijakan . (Mazmanian dan Sabatier dari Wahab,2012 : 140)

Beberapa kriteria kebijakan yang dijelaskan oleh Dunn dalam *Public Policy* (2014:282) diantaranya adalah :

1. Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektivitas bersinggungan dengan pertanyaan apakah di dalam suatu pilihan-pilihan kebijakan mampu atau tidak untuk mencapai ekspektasi yang diharapkan, rasionalitas pelaksanaan secara teknis dan terukur dari setiap produk dan layanan.

2. Efisiensi (*Efficiency*)

Berkaitan dengan hal ihwal kemampuan pencapaian suatu kebijakan dengan sumber daya yang dimiliki dan usaha yang paling optimal.

3. Kecukupan (*Adequacy*)

Berkaitan dengan suatu kemampuan untuk melihat seberapa jauh kepuasan terhadap tingkat efektivitas dan kesempatan yang memicu adanya permasalahan.

4. Pemerataan (*Equity*)

Pemerataan meliputi hubungan antara rasionalitas legal dan sosial mengambil langkah distribusi dari pengambilan tindakan yang berbeda-beda dalam sebuah masyarakat.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Kategori ini berkaitan dengan orientasi hasil, apakah memunculkan tanggapan positif atau negatif kemudian apakah memberikan suatu kepuasan sesuai dengan harapan.

6. Ketepatan (*Appropriateness*) Ketepatan berhubungan dengan rasionalitas dan substantif. Melihat kesesuaian antara aplikasi dengan landasan nilai dan tujuan dari program kepada kekuatan asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Penting untuk diperhatikan bahwa dalam penelitian, penggunaan teori akan menjadi tolak ukur kesuksesan sebuah penelitian, sehingga penulis menyitir teori mengenai implementasi kebijakan dari Van Metter dan Carl Van Horn yang menurut penulis paling sesuai dengan masalah pada penelitian kali ini. Agustino (2014 : 141) menyebutkan beberapa hal yang dapat memengaruhi kinerja kebijakan public, diantaranya :

- a Sasaran dan Standar Kebijakan yang Jelas

Jika kebijakan sifatnya berorientasi kepada realitas dengan sosiokultur yang ada pada level pelaksana kebijakan maka keberhasilannya dapat terukur dengan baik.

- b Sumberdaya (*Resources*)

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting penentu keberhasilan suatu kebijakan, sehingga perlu diperhatikan sejauh mana kemampuan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

c Kriteria Lembaga Pelaksana

Organisasi formal dan Informal yang ada di dalam lembaga pelaksana kebijakan yang akan akan melibatkan diri dalam pelaksanaan kebijakan akan dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat sesuai dengan agen dan cakupan luasnya wilayah pengimplementasian kebijakan , maka perlu dicermati ketika akan menentukan agen pelaksana kebijakan.

d Kecenderungan (*Disposition*) Pelaksana Kebijakan

Kebijakan yang dibuat akan menghasilkan dua reaksi, penolakan atau penerimaan. Maka penting untuk melihat sikap psikologis agen pelaksana kebijakan apakah cenderung menerima kebijakan atau menolak kebijakan sehingga hal tersebut bisa memengaruhi keberhasilan terlaksananya kebijakan.

e Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Para Pelaksana Kebijakan

Koordinasi adalah salahsatu mekanisme yang sangat penting dan menentukan keberhasilan terlaksananya kebijakan. Koordinasi, Komunikasi dan konfirmasi adalah tiga hal penting yang harus tertanam pada diri agen pelaksana kebijaka sehingga dapat menghantarkan kepada keberhasilan kebijakan.

f Lingkungan Politik Sosial dan Ekonomi

Van Meter dan Van Horn menawarkan cara terakhir untuk menghantarkan tercapainya suatu keberhasilan kebijakan dengan memperhatikan masalah eksternal lingkungan dan kontrol sosial , perhitungan yang matang dari

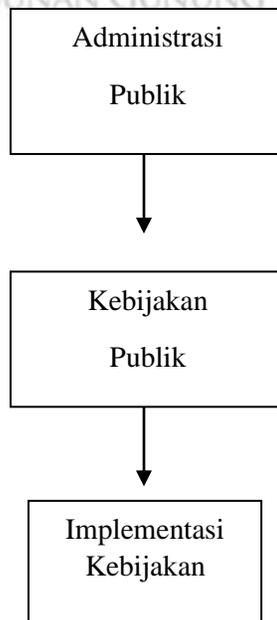
lingkungan eksternal ini dapat menghantarkan kepada keberhasilan terlaksananya suatu kebijakan.

Teori yang dipilih oleh penulis sangat sesuai dengan permasalahan positif yang terjadi di lingkungan kecamatan Mandalajati dalam melaksanakan kebijakan program aplikasi Sistem Informasi Penilaian Bandung Juara yang telah meraup prestasi bertahan dalam menjalankan program tersebut, baik itu dari segi komunikasi internal dan eksternal, control sosial, sumberdaya manusia yang memadai, kemudian kecenderungan atau motivasi melaksanakan kebijakan mengenai SIP Bandung Juara ini nampaknya sangat tinggi dan kemudian akan penulis paparkan pada pembahasan berikutnya untuk membuktikan sejauh mana faktor-faktor keberhasilan kebijakan aplikasi SIP Bandung Juara dilaksanakan dengan baik.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI



1.6 Proposisi

Implementasi Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara Di Lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung” akan berjalan sangat baik dan efektif apabila sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan, *resources*, kecenderungan dan sikap pelaksana kebijakan, komunikasi antar organisasi serta lingkungan eksternal politik, sosial dan ekonomi.

